

RAPERDA RUSUNAWA DI TEMANGGUNG

Dibahas Intensif DPRKPLH dan DPRD

TEMANGGUNG (KR) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan DPRD semakin intensif dibahas. Ditargetkan raperda tersebut dapat segera rampung dan diketok pada sidang paripurna terdekat atau sebelum berakhirnya tahun 2023. Anggota Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kabupaten Temanggung, Badrun Mustofa mengatakan perda tentang pengelolaan rumah

susun sederhana sangat ditunggu masyarakat. "Masyarakat dan pemerintah menunggu kepastian hukum dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Semoga segera dapat disahkan di sidang paripurna," ungkapnya, Rabu (26/7). Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kabupaten Temanggung dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Temanggung juga telah melakukan kunjungan lapangan di rumah susun sederhana sewa, Senin (24/7).

Dua rumah susun sederhana sewa yang ditinjau berada di Kranggan dan Kertosari. "Peninjauan ini untuk melihat langsung kondisi dan permasalahan yang ada di lokasi," jelas Sekretaris DPRKPLH Anggit Triwahyu Widodo ST MM. Kepala DPRKPLH Temanggung, Hendra Sumaryana menambahkan, kunjungan lapangan merupakan tindak lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. "Memang diperlukan kun-

jungan lapangan dalam pembahasan raperda. Ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan rusunawa," tandasnya. (Osy)-f



Rombongan DPRKPLH dan DPRD Temanggung saat mengunjungi lokasi rusunawa.

SUKOHARJO TEKAN ANGKA KEMISKINAN Ekonomi Kerakyatan Makin Diberdayakan

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo terus berusaha menekan angka kemiskinan, salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo saat ini 7,61 persen, terendah di Soloraya dan nomor delapan di Jawa Tengah. Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo 0,36 persen terendah di Soloraya dan terendah kedua di Jawa Tengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo mengatakan, keberhasilan menekan angka kemiskinan di tingkat Soloraya dan Jawa Tengah, tidak membuat Pemkab Sukoharjo berdamai diri. Berbagai upaya terus dilakukan untuk terus menekan angka kemiskinan serendah mungkin. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menjalankan kebijakan baik dari tingkat pusat, provinsi dan daerah. Salah satu yang terus dilakukan yakni dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. "Dimulai dari hal terkecil seperti pember-

dayaan unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) rumah tangga, lingkungan RT RW, desa, kelurahan dan kecamatan, semua digerakkan. "Selain itu sektor usaha menengah dan besar juga dikerjakakan karena di sana ada nilai ekonomi yang membutuhkan pekerja. Dari situ, warga bisa mendapatkan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga," jelas Widodo, Kamis (27/7). Disebutkan oleh Sekda, pendampingan juga diberikan kepada pelaku UMKM, seperti kesempatan pameran produk, penguatan pemasaran dan bantuan permodalan. Dengan memiliki usaha, secara otomatis warga bisa mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan warga bisa menurun. Khusus untuk UMKM, ada ratusan ribu unit usaha yang dijalankan warga. Bentuk usahanya juga variatif, seperti produk makanan, minuman, kerajinan dan lainnya. Terpisah, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengungkapkan, Pemkab patut bersyukur bahwa berbagai

upaya yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat telah memberikan hasil yang menggembirakan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan, angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo 7,61 persen, terendah di Soloraya dan nomor delapan di Jawa Tengah. Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo 0,36 persen terendah di Soloraya dan terendah kedua di Jawa Tengah. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terbaik untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah, dengan angka 77,68. Di sisi lain, angka pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo juga mulai merangkak positif di angka 5,61 persen. Padahal sempat terkontraksi di angka -1,7 persen pada saat pandemi Covid-19," ungkap Etik Suryani. Menurutnya, salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan diskresi dalam pelaksanaannya. Disisi lain, ada potensi besar di daerah yang sebenarnya bisa di-

gali lebih optimal, yakni dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Hanya saja, sampai saat ini pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. "Hal tersebut bisa dilihat dari tiga hal, yakni kepesertaannya, kontribusi pendanaannya, dan program TJSLP yang dijalankan," jelas bupati. Dari sisi kepesertaan, sampai dengan tahun 2022 rata-rata masih di bawah 40 perusahaan dan kecenderungannya terus menurun. Tahun 2020, kepesertaannya sebanyak 28 perusahaan, sedangkan tahun 2021 sebanyak 37 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 23 perusahaan. Padahal di Kabupaten Sukoharjo terdapat 17 perusahaan besar, 158 perusahaan sedang, dan 1.015 perusahaan kecil. "Kondisi yang sama juga bisa dilihat dari kontribusi pendanaannya. Tahun 2020 kontribusinya Rp 10,8 miliar, tahun 2021 sebesar 14,1 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 13,2 miliar," ungkap Etik Suryani. (Mam)-f

PAW KADES BUNTAR MOJOGEDANG Nurul Menangkan Pemilihan



KR-Abdul Alim

Foto bersama para calon kades PAW Desa Buntar Kecamatan Mojogedang.

KARANGANYAR (KR) - Nurul Andre Astuty memenangkan Pilkades Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Buntar Kecamatan Mojogedang, Rabu (26/7). Ia mengalahkan dua calon kades lainnya, yakni Tintus Prihantoro dan Ngadino Dwi Purnomo. Nurul memperoleh 22 suara, Tintus 19 suara, dan Ngadino 5 suara. Total pemilih suara 47 orang warga dan perwakilan dusun serta BPD Buntar. Saat pemungutan, seorang pemilih suara berhalangan hadir karena sakit. Ketua Panitia Pilkades PAW Buntar, Aji Gutomo mengaku lega pemungutan dan penghitungan suara beres. Para pemilih dari unsur perangkat desa sebanyak 11 orang, BPD 7 orang, perwakilan warga perwakilan dari lima dusun, dan tokoh masyarakat 9 orang. Satu orang dari tokoh masyarakat tidak hadir. "Pemilihan juga dipantau langsung Bupati Karanganyar Julyatmono. Beliau berpesan agar jaga keamanan sebelum dan sesudah pemilihan. Juga agar yang kalah tetap mendukung program desa dan yang menang melanjutkan visi misi kades definitif," kata Aji, usai Pilkades PAW. Menurutnya, panitia Pilkades sebanyak 9 orang terbentuk dalam Musyawarah Desa. Sembilan orang itu dari warga yang benar-benar netral dari Karanganyar. "Panitia yang muda-muda. Kami menghindari gugatan di kemudian hari sehingga semua tahapan bebar-benar sesuai regulasi," jelas Aji Gutomo. Kabid Aparatur Pemerintah Desa Dispermasdes Karanganyar, Anung Dharmawan mengatakan tahapan sosialisasi sampai pemungutan suara lancar. "Tinggal mekanisme pelaporan berita acara dari tingkat desa ke Bupati Karanganyar," tandasnya. (Lim)-f

HUKUM

FOKUS DAMPINGI PENGEMBALIAN UANG TIKET Polisi Lepas Perusak Properti Konser

KARANGANYAR (KR) - Polres Karanganyar belum akan memproses kasus perusakan properti oleh penonton konser musik rock bertajuk *Don't Stop Fest, Take Your Dream di De Tjolomadoe* pada Sabtu (22/7) lalu. Polisi fokus mendampingi EO mengembalikan uang tiket milik penonton. Hal itu disampaikan Wakapolres Karanganyar, Kompol Muh Rikha Zulkarnaen, Kamis sore (27/7) sore. Tiga personel EO konser dihadirkan dengan didampingi kuasa hukumnya, Guruh Teguh Jendradi. "Polisi fokus mengawal tanggungjawab EO ke penonton. Belum sampai ke perkara perusakan," jelasnya. Dalam video viral di media sosial terkait kerusakan konser terlihat tenda berantakan akibat diamuk penonton. Properti panggung juga terkena lemparan benda-benda. Sementara itu Event Organizer konser rock tersebut, mengaku tak habis pikir tindakan vendor yang mematikan sound system. Guruh Teguh Jendradi mengatakan konser tak perlu gagal apabila vendor sound system melakukan tugasnya. Dalam perjanjian sewa menyewa peralatan sound disepakati sewa menyewa Rp 170 juta. Dari jumlah itu, telah dibayar uang muka Rp 44 juta. "Tujuh artis band sudah terbayar Rp

120 juta. Uang muka vendor juga sudah dan hal-hal lain yang diperlukan. Saat pelaksanaan, klien kami minta vendor menghidupkan sound, tapi ditolak sebelum melunasi saat itu juga secara tunai. Pasti kami lunasi bahkan jaminannya satu unit mobil, tetap enggak mau," tegas Guruh. Sedianya tujuh band manggung mulai pukul 15.00 WIB. Piranti sound system sempat berfungsi saat dua kali check sound, namun video trone dipadamkan. Setelah itu semua tak dinyalakan hingga membuat para penonton kebingungan. Apalagi penonton mulai tak sabar sehingga melampiaskan kekesalan dengan merusak properti. "Sebenarnya ada masalah apa vendor itu sehingga sengaja berbuat demikian. Kami komitmen bayar kok. Udah ada uang muka Rp 44 juta. Biasanya, pelunasan saat break waktu magrib. Klien ngasih jaminan mobil harganya Rp 100-an juta, juga penjualan tiket sampai hampir 2.000 lembar. Apa mungkin klien saya enggak bayar," tuturnya. Sebagaimana diberitakan, konser musik rock di De Tjolomadoe pada Sabtu (22/7), gagal lantaran sound system tak dinyalakan vendor. Ratusan penonton yang kecewa akhirnya berbuat anarkis dengan merusak properti EO. (Lim)-f

KASUS TPPO DI PASAR KEMBANG Eksplotasi LC, Pemilik Salon Diringkus

YOGYA (KR) - Diduga telah melakukan Tindak Pidana Perda-gangan Orang (TPPO) dengan mengeksploitasi puluhan perempuan sebagai pekerja pemandu lagu (LC), dua tersangka diamankan polisi. Tersangka AW (43) seorang pemilik salon warga Gedongtengen Yogya selaku perekrut dan penampung LC serta tersangka SU (49) warga Kebumen Jawa Tengah selaku penjaga salon dan admin. "AW mendapatkan keuntungan dari penghasilan sebesar 25 persen dari hasil masing-masing LC. Sedang SU penjaga salon 24 jam yang menerima/mengelola uang, melakukan wawancara pada pekerja, menyimpan semua identitas LC dan mendapatkan gaji dari AW, serta tambahan penghasilan dari pekerja LC yang ditunjuk AW," ungkap Kasat Reskrim Polresta Yogya, AKP Archye Nevadha SIK, Kamis (27/7) siang. Disebutkan Jumat (21/7) sekitar pukul 14.00, petugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta menerima informasi adanya penampungan pekerja LC di salon daerah Gedongtengen Yogya. "Selanjutnya dilakukan pengecekan ke TKP dan didapatkan adanya 53 wanita dan 4 laki-laki, yang kemudian diamankan ke Polresta Yogyakarta," ungkap Archye yang didampingi Kabid Humas Polresta Yogya, AKP Timbul SR SH. Pada pukul 20.00-04.00 di 7 lokasi di Pasar Kembang," jelasnya. Didapatkan barang bukti berupa beberapa map warna merah yang berisi data personal, beberapa bendel laporan harian, buku yang berisi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran. "Tersangka dijerat pidana Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak. Pasal 761 UU No 35 Tahun 2014, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP," jelasnya. (Vin)-f



Dua tersangka dihadirkan dalam rilis pidana TPPO di Mapolresta Yogya.



KR-Judiman

Petugas Polsek Imogiri melakukan pengecekan kandang ternak.
BANTUL (KR) - Kasus pencurian ternak saat ini marak di wilayah Bantul. Terakhir pencurian ternak meny-

Pencurian Ternak Marak di Bantul

kambing jantan jenis gembel senilai Rp 5 juta. Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana, mengungkapkan kasus pencurian hewan ternak di Imogiri ini, merupakan kejadian yang kesekian kalinya terjadi di wilayah Bantul. "Tercatat, ada 13 ekor burung murai dan 4 ekor kambing milik warga yang hilang dicuri selama bulan Juni lalu," ujarnya. Sedangkan pencurian yang menasar tempat Waliman tersebut terjadi pada Rabu (26/7). Pencurian tersebut, diketahui korban sekira pukul 06.00. Kemudian korban melapor ke Polsek Imogiri. Hingga kini petugas Polsek Imogiri masih melakukan pelacakan terhadap pelaku pencurian tersebut.

Menurut catatan di Polres Bantul, kasus pencurian ternak atau kambing di Bantul pada Juni 2023, pertama terjadi di Timbulharjo Sewon Bantul. Korbananya Ircham Mustaqim (29) mengalami kerugian 2 ekor kambing senilai Rp 6 juta. Pencurian ternak juga dialami Boby Prabowo (24) warga Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul, mengalami kerugian Rp 6,1 juta karena dua ekor kambing miliknya digasak maling pada Minggu (25/6). Pencuri tidak hanya menasar kambing saja, tapi juga mengincar burung kicau milik warga yang mempunyai nilai jual tinggi. Seperti pencurian yang menimpa Antena (39) warga Bakal Argodadi Sedayu Bantul. Kor-

ban mengalami kerugian mencapai Rp 150 juta, akibat 13 burung murai batu miliknya disikat pencuri pada Kamis (8/6) lalu. "Untuk mencegah terjadinya kasus pencurian hewan ternak, kami mengimbau warga untuk memberikan pererangan yang cukup di kandang, mengunci kandang, memasang lonceng pada leher hewan ternak, serta mengecek kandang ternak secara rutin. Kemudian untuk burung yang memiliki harga tinggi di pasaran, sebaiknya ditaruh di dalam rumah," imbau Iptu Jeffry. Pelaku pencurian ternak bisa dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (Jdm)-f